

+

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2026**



**B K A D**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -2029.

Melalui penyusunan Renja ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 01 September 2025  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



SAHABUDDIN, SE  
N I P : 197812212002121005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
I.1. Latar Belakang .....	3
I.2. Landasan Hukum .....	3
I.3. Maksud dan Tujuan.....	4
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD .....	19
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	54
III.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional .....	54
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	55
IV.1. Program dan Kegiatan .....	55
BAB V PENUTUP .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
3. Penyusunan rencana anggaran perangkat daerah.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

## BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu an perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

## BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bagian ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SIDRAP

Pada bagian ini memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

## BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat**

##### **Daerah**

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029. Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2024 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2024.

Adapun keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, bahan evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel T.C 29:

## TC.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2024  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
				Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>KEUANGAN</b>										
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100%					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	95 %	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	70%	

	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan		20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (%)									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)									
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</b>									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	10 Bulan	97%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 exemplar	5 exemplar	5 exemplar	5 exemplar		5 exemplar	5 exemplar	-	

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket		30 Paket	30 Paket	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali		200 Kali	200 Kali	100%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	10 Bulan	99%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	10 Bulan	99%	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)									
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	-	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)</b>									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar	1000 Lembar		1000 Lembar	1000 Lembar	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	

	Disediakan (Laporan)									
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</b>									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	46 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit		46 Unit	46 Unit	-	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit		15 Unit	15 Unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit		30 Unit	30 Unit	-	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS (%)									
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)									
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	4 Dokumrn	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		4 Dokumrn	4 Dokumrn	-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</b>									
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	-	

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen )	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	-	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen )	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Bulan	2 Bulan	2 Bulan	2 Bulan		2 Bulan	2 Bulan	-	
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi (%)</b>									
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	-	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	480 Dokumen	480 Dokumen	480 Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen	480 Dokumen	-	

	Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen )									
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	-	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen )	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen )	40%	40%	40%	40%		40%	40%	-	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen )	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	

	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen )									
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen )	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	-	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>									
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	-	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan		68 Laporan	68 Laporan	-	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	-	

	(Laporan)									
<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</b>									
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	89%	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	80%	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang		12 orang	12 orang	70%	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik (%)</b>									
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi (%)</b>									
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	98%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	

Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	100%	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan )									
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan )	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97%	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80%	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	97%	

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilakukan melalui pengkajian atas capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kinerja yang dibutuhkan, termasuk dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pelayanan tersebut. Analisis ini juga mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Secara umum, sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian indikator sasaran yang mampu memenuhi target yang diharapkan. Keberhasilan tersebut juga terlihat pada pencapaian kinerja kegiatan di masing-masing bidang, yang menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan berhasil dalam mengimplementasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel T.C 30 yang menyajikan indikator dan hasil capaian kinerja secara terukur.

### TC.30 PENCAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Opini Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

## II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan kondisi atau hal yang harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset di masa mendatang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan administrasi pemerintahan masih menghadapi sejumlah kendala seperti yang tertuang dalam Renstra PD 2025-2029, antara lain:

- kuantitas SDM aparatur yang belum memadai dan masih berada di bawah kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja;
- sarana dan prasarana kantor yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- adanya perubahan struktur organisasi;
- rendahnya koordinasi secara vertikal maupun horizontal;
- ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat yang masih relatif tinggi sehingga berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pembangunan daerah; serta
- tantangan dalam mempertahankan opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kendala-kendala tersebut pada akhirnya berkaitan erat dengan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKAD yang harus mendapat perhatian

serius dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan maupun aset di masa mendatang. Beberapa isu penting yang menjadi sorotan meliputi tuntutan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, terutama dalam rangka mempertahankan opini audit yang baik dari BPK. Selain itu, pengelolaan aset daerah masih menghadapi tantangan dari sisi pencatatan, penilaian, optimalisasi pemanfaatan, serta penertiban administrasi yang membutuhkan penguatan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang dinamis menuntut kemampuan adaptasi BKAD dalam menyesuaikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta aset. Hal ini memerlukan integrasi data yang lebih akurat dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital guna mendukung sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang efektif. Tidak kalah penting, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta tingkat literasi keuangan aparatur, masih menjadi kendala yang harus segera diatasi agar penyelenggaraan fungsi BKAD berjalan optimal.

Apabila isu-isu strategis tersebut tidak diantisipasi dengan baik, maka berisiko menimbulkan lemahnya pengendalian keuangan daerah, rendahnya akuntabilitas, serta kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian jangka panjang. Sebaliknya, jika isu-isu ini dikelola secara tepat, maka akan menjadi peluang besar bagi BKAD untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### **II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan sebagai upaya untuk membandingkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKAD dengan arahan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan analisis kebutuhan yang mengacu pada capaian kinerja Renstra BKAD serta evaluasi tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai dalam periode sebelumnya. Dengan demikian, telaahan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan BKAD sejalan dengan target pembangunan daerah, sekaligus selaras dengan pagu indikatif yang telah ditentukan.

Review terhadap rancangan awal RKPD BKAD mencakup kegiatan identifikasi terhadap prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran yang ingin dicapai, serta besaran pagu indikatif yang dialokasikan. Melalui review ini, dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan BKAD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik dari sisi akuntabilitas maupun efektivitas pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya telaahan tersebut, BKAD diharapkan mampu menyusun rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan berbasis pada kebutuhan nyata, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD BKAD selanjutnya dituangkan dalam tabel T.C31 yang memuat secara rinci prioritas program, indikator kinerja, target sasaran, serta alokasi pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan.

**TC.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Kode	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	21.424.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	21.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	40.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	23.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	24.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	3 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Dokumen	40.000.000	

			SKPD (Dokumen)					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	27.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	28.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20 Laporan	22.154.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20 Laporan	23.500.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	11.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (%)		<b>16.313.611.783</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (%)			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12 Bulan	16.248.111.783	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12 Bulan	16.248.111.783	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Bulan	139.910.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Bulan	139.910.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Bulan	10.400.000	Koordinasi dan Pelaksanaan		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa	12 Bulan	10.400.000	

			SKPD (Dokumen)			Akuntansi SKPD		n Akuntansi SKPD (Dokumen)			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Dokumen	10.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Dokumen	10.100.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12 Bulan	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12 Bulan	10.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	15.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	4.589.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Orang	5.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Kegiatan	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1 Kegiatan	5.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Bulan	7.000.000	

								Disediakan (Paket)			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	8.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	8.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Bulan	6.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 example r	12.371.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 exemplar	12.371.000	

	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30 Paket	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200 Kali	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200 Kali	50.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Bulan	5.000.000	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Dokumen	2.355.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Dokumen	2.360.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	15.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	15.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		<b>Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		<b>Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)</b>			

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	1000 Lembar	7.557.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	1000 Lembar	7.557.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	280.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	280.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	130 Dokumen	50.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	130 Dokumen	50.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	228.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Bulan	228.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik</b>			

	<b>Pemerintahan Daerah</b>		<b>Daerah (%)</b>			<b>Pemerintahan Daerah</b>		<b>Daerah (%)</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	46 Unit	313.201.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	46 Unit	313.201.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30 Unit	24.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30 Unit	24.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Dokumen	16.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Dokumen	16.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS (%)			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS (%)			
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen )	2 Dokumen	100.637.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen )	2 Dokumen	100.637.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	2 Dokumen	69.672.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	2 Dokumen	69.672.000	

	dan Perubahan PPAS		Disusun (Dokumen )			Perubahan PPAS		PPAS yang Disusun (Dokumen )			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	4 Dokumen	36.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	4 Dokumen	36.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	45.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	45.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	32.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	32.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	27.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )	3 Dokumen	27.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen )	2 Dokumen	102.360.600	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	102.360.600	

						Penjabaran APBD		APBD (Dokumen )			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	78.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	78.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )	2 Dokumen	21.989.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )	2 Dokumen	21.989.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen )	2 Dokumen	18.536.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen )	2 Dokumen	18.536.000	

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen )	2 Dokumen	21.317.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen )	2 Dokumen	21.317.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2 Dokumen	21.988.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2 Dokumen	21.988.000	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Dokumen	25.500.000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota (Orang)	2 Dokumen	25.500.000	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</b>			<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</b>			

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )	12 Bulan	50.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )	12 Bulan	50.000.000	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12 Bulan	25.000.000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12 Bulan	25.000.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )	12 Bulan	25.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )	12 Bulan	25.000.000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	15.000.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan	12 Bulan	15.000.000	

								n Daerah (Dokumen )			
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )	12 Bulan	15.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisa si, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaa n Dana Perimbang an dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )	12 Bulan	15.000.000	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )	12 Bulan	15.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaa n Kerja Sama dan Pemantaua n Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	12 Bulan	15.000.000	

								Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran	36 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	36 Laporan	15.000.000	

			Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)					n Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)		
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen )	6 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisa	6 Dokumen	5.000.000

								si Kas (Dokumen )			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15.000.000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	12 bulan	10.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausaha		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	12 bulan	10.000.000	

			Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen )			an dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen )			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Bulan	5.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 Bulan	5.000.000	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi (%)</b>			<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi (%)</b>			
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12 bulan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	12 bulan	15.000.000	

								Daerah (Laporan)			
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen )	480 Dokumen	10.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen )	480 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18 Dokumen	15.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18 Dokumen	10.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	10.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	1 Dokumen	15.000.000	

			Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)			Pemerintah Daerah		Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen )	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen )	2 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap	1 Dokumen	50.000.000	

	n Pelaksanaan APBD		Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen )			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen )			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen )	25 Dokumen	12.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen )	25 Dokumen	50.000.000	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen )	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen )	1 Dokumen	12.000.000	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	1 Dokumen	5.000.000	

	Akuntansi Pemerintah Daerah		n Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen )			aan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen )			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen )	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen )	1 Dokumen	10.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 kali	12.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2 kali	10.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	2 Dokumen	10.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	2 Dokumen	12.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	10.000.000	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>			<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>		10.000.000	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12 Bulan	2.100.000.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12 Bulan	2.100.000.000	

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12 Bulan	108.740.813.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12 Bulan	108.740.813.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12 Bulan	4.383.324.487	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12 Bulan	4.383.324.487	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	100%	15.000.000	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	100%	6.650.000.000	
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</b>			<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</b>			

						<b>Keuangan Daerah</b>					
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	22.096.000	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	23.500.000	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	908.936.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )	12 Bulan	910.000.000	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	12 Bulan	31.096.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	12 Bulan	32.000.000	

			Kabupaten/Kota (Orang)			Kabupaten/Kota		Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota (Orang)			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik (%)</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik (%)</b>			
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi (%)</b>			<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi (%)</b>			
	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2 Dokumen	25.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )	2 Dokumen	25.000.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	15.000.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	15.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	12 Bulan	15.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5 Dokumen	130.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5 Dokumen	130.000.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30 Dokumen	10.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	30 Dokumen	10.000.000	

								Daerah (Laporan)			
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan )		10.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan )	12 Dokumen	10.000.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	2 Dokumen	7.500.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	7.500.000	

	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2 Dokumen	7.500.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2 Dokumen	7.500.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2 Dokumen	7.572.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2 Dokumen	7.572.000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Program prioritas nasional yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menetapkan arah dan tujuan pembangunan Indonesia untuk periode tersebut. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta penguatan pertahanan dan keamanan, reformasi birokrasi, pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kota inovatif dan mandiri, Perlindungan Hak Perempuan, Anak, dan Disabilitas, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal.

#### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan visi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan strategis 2025 - 2029 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan sasaran :

- Terwujudnya ketetapan waktu penyusunan APBD
- Terwujudnya pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas
- Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas
- Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **IV.1. Program dan Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 sebagai berikut.

1. Program Penunjang urusan kabupaten/kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:
  - a. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
  - b. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
  - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
  - d. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
  - e. Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - a. Pengelolaan barang milik daerah

Berikut disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2026 pada tabel TC.33 berikut ini :

## TC.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5,02</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>170.532.597.713</b>	APBD			<b>170.733.957.981</b>
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>23.990.185.713</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>24.191.545.981</b>
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan</b>		<b>100 Dokumen</b>	<b>95.660.000</b>	APBD		<b>100 Dokumen</b>	<b>95.660.000</b>
5.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	16.160.000	APBD		5 Dokumen	16.160.000
5.02.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3 Dokumen	15.500.000	APBD		3 Dokumen	15.500.000

5.02.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA- SKPD		3 Dokumen	11.000.000	APBD		3 Dokumen	11.000.000
5.02.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3 Dokumen	15.500.000	APBD		3 Dokumen	15.500.000
5.02.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA- SKPD		3 Dokumen	11.000.000	APBD		3 Dokumen	11.000.000
5.02.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 Laporan	15.500.000	APBD		20 Laporan	15.500.000

5.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	11.000.000	APBD		2 Laporan	11.000.000
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>		<b>100 %</b>	<b>17.967.242.713</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>18.168.602.981</b>
5.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		173 Orang/bulan	17.901.742.713	APBD		173 Orang/bulan	18.103.102.981
5.02.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	15.000.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000
5.02.01.2.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	10.400.000	APBD		12 Dokumen	10.400.000
5.02.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10.100.000	APBD		1 Laporan	10.100.000
5.02.01.2.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	10.000.000

5.02.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		17 Laporan	15.000.000	APBD		17 Laporan	15.000.000
5.02.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>10.000.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>10.000.000</b>
5.02.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Orang	5.000.000	APBD		1 Orang	5.000.000
5.02.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Orang	5.000.000	APBD		1 Orang	5.000.000

<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>94 %</b>	<b>677.582.000</b>	APBD		<b>94 %</b>	<b>677.582.000</b>
5.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	7.000.000	APBD		12 Paket	7.000.000
5.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	395.355.500	APBD		12 Paket	395.355.500
5.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	6.000.000	APBD		12 Paket	6.000.000
5.02.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		5 Dokumen	12.371.000	APBD		5 Dokumen	12.371.000
5.02.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		30 Paket	10.000.000	APBD		30 Paket	10.000.000
5.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	236.855.500	APBD		200 Laporan	236.855.500

5.02.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	5.000.000
5.02.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	5.000.000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang</b>		<b>100 %</b>	<b>4.115.000.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>4.115.000.000</b>
5.02.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	4.100.000.000	APBD		2 Unit	4.100.000.000
5.02.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	15.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		<b>90 %</b>	<b>546.500.000</b>	APBD		<b>90 %</b>	<b>546.500.000</b>
5.02.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000 Laporan	7.557.000	APBD		1.000 Laporan	7.557.000

5.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	253.443.000	APBD		12 Laporan	253.443.000
5.02.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		130 Laporan	50.500.000	APBD		130 Laporan	50.500.000
5.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	235.000.000	APBD		12 Laporan	235.000.000
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>77 %</b>	<b>578.201.000</b>	APBD		<b>77 %</b>	<b>578.201.000</b>
5.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		46 Unit	313.201.000	APBD		46 Unit	313.201.000
5.02.01.2.09.00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	25.000.000	APBD		15 Unit	25.000.000

5.02.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	124.000.000	APBD		30 Unit	124.000.000
5.02.01.2.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	116.000.000	APBD		1 Unit	116.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<b>Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS</b>		100 %	146.082.252.000	APBD		100 %	146.082.252.000
		<b>Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu</b>		100 %		APBD		100 %	
		<b>Persentase Realisasi Keuangan APBD</b>		100 %		APBD		100 %	
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun</b>		100 %	600.000.000	APBD		100 %	600.000.000
5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	100.637.400	APBD		2 Dokumen	100.637.400
5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	69.672.000	APBD		2 Dokumen	69.672.000

5.02.02.2.01.00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		3 Dokumen	36.000.000	APBD		3 Dokumen	36.000.000
5.02.02.2.01.00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi		3 Dokumen	45.000.000	APBD		3 Dokumen	45.000.000
5.02.02.2.01.00 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		3 Dokumen	32.000.000	APBD		3 Dokumen	32.000.000
5.02.02.2.01.00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi		3 Dokumen	27.000.000	APBD		3 Dokumen	27.000.000
5.02.02.2.01.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	102.360.600	APBD		2 Dokumen	102.360.600
5.02.02.2.01.00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	78.000.000	APBD		2 Dokumen	78.000.000
5.02.02.2.01.00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2 Dokumen	21.989.000	APBD		2 Dokumen	21.989.000

5.02.02.2.01.00 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		2 Dokumen	18.536.000	APBD		2 Dokumen	18.536.000
5.02.02.2.01.00 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		2 Dokumen	21.317.000	APBD		2 Dokumen	21.317.000
5.02.02.2.01.00 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		2 Dokumen	21.988.000	APBD		2 Dokumen	21.988.000
5.02.02.2.01.00 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		2 Orang	25.500.000	APBD		2 Orang	25.500.000
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan</b>		<b>100 %</b>	<b>195.000.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>195.000.000</b>
5.02.02.2.02.00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan KasDaerah		12 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	50.000.000
5.02.02.2.02.00 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	25.000.000	APBD		12 Laporan	25.000.000

5.02.02.2.02.00 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		12 Dokumen	25.000.000	APBD		12 Dokumen	25.000.000
5.02.02.2.02.00 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		12 Dokumen	15.000.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000
5.02.02.2.02.00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Transfer Lainnya		12 Dokumen	15.000.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000
5.02.02.2.02.00 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		12 Dokumen	15.000.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000

5.02.02.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		36 Laporan	15.000.000	APBD		36 Laporan	15.000.000
-----------------------	--	--	--	------------	------------	------	--	------------	------------

5.02.02.2.02.00 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		6 Dokumen	5.000.000	APBD		6 Dokumen	5.000.000
5.02.02.2.02.00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
5.02.02.2.02.00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	10.000.000

5.02.02.2.02.00 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		2 Orang	5.000.000	APBD		2 Orang	5.000.000
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi</b>		<b>100 %</b>	<b>214.000.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>214.000.000</b>
5.02.02.2.03.00 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		12 Laporan	10.000.000	APBD		12 Laporan	10.000.000
5.02.02.2.03.00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		480 Dokumen	10.000.000	APBD		480 Dokumen	10.000.000

5.02.02.2.03.00 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		18 Laporan	15.000.000	APBD		18 Laporan	15.000.000
5.02.02.2.03.00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
5.02.02.2.03.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksan aan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000

5.02.02.2.03.00 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
5.02.02.2.03.00 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		25 Dokumen	12.000.000	APBD		25 Dokumen	12.000.000
5.02.02.2.03.00 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
5.02.02.2.03.00 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000

5.02.02.2.03.00 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
5.02.02.2.03.00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		2 Orang	12.000.000	APBD		2 Orang	12.000.000
5.02.02.2.03.00 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		2 Lembaga	10.000.000	APBD		2 Lembaga	10.000.000
5.02.02.2.03.00 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>145.058.252.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>145.058.252.000</b>

5.02.02.2.04.00 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		12 Laporan	2.850.000.000	APBD		12 Laporan	2.850.000.000
5.02.02.2.04.00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		68 Laporan	128.278.118.000	APBD		68 Laporan	128.278.118.000
5.02.02.2.04.00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	5.000.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000.000
5.02.02.2.04.00 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		12 Laporan	8.930.134.000	APBD		12 Laporan	8.930.134.000
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan</b>		<b>100 %</b>	<b>15.000.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>15.000.000</b>
5.02.02.2.05.00 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		12 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	5.000.000

5.02.02.2.05.00 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		12 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	5.000.000
5.02.02.2.05.00 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		12 Orang	5.000.000	APBD		12 Orang	5.000.000
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik</b>		<b>100 %</b>	<b>460.160.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>460.160.000</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi</b>		<b>100 %</b>	<b>460.160.000</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>460.160.000</b>
5.02.03.2.01.00 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	25.000.000	APBD		2 Dokumen	25.000.000
5.02.03.2.01.00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		4 Dokumen	25.000.000	APBD		4 Dokumen	25.000.000
5.02.03.2.01.00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		12 Laporan	37.588.000	APBD		12 Laporan	37.588.000

5.02.03.2.01.00 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		12 Laporan	15.000.000	APBD		12 Laporan	15.000.000
5.02.03.2.01.00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		5 Laporan	250.000.000	APBD		5 Laporan	250.000.000
5.02.03.2.01.00 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		30 Laporan	10.000.000	APBD		30 Laporan	10.000.000
5.02.03.2.01.00 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		12 Laporan	75.000.000	APBD		12 Laporan	75.000.000
5.02.03.2.01.00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	7.500.000	APBD		2 Dokumen	7.500.000

5.02.03.2.01.00 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		2 Laporan	7.500.000	APBD		2 Laporan	7.500.000
5.02.03.2.01.00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		2 Laporan	7.572.000	APBD		2 Laporan	7.572.000

## **BAB V**

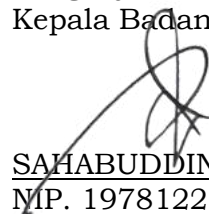
### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 serta Rancangan Awal Renstra BKAD tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangkajene Sidenreng, 01 September 2025  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



SAHABUDDIN, SE  
NIP. 19781221 200212 1 005